

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab akhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Dinamika Reunifikasi Korea Selatan-Korea Utara (1950-2019). Dalam pembahasan di bawah ini akan menjelaskan yang berhubungan dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan topik penelitian yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, serta bagi pengembang kurikulum pendidikan sejarah dan guru sejarah yang dapat menjadikan bahasan muatan sejarah negara Asia Timur, terutama mengenai reunifikasi Korea Selatan-Korea Utara sebagai pembelajaran.

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait penulisan mengenai “Dinamika Reunifikasi Korea Selatan-Korea Utara (1950-2019)” dapat diambil beberapa kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa terpecahnya Semenanjung Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara merupakan akibat dari Perang Dingin. Berawal dari penjajahan Jepang terhadap Korea, yang kemudian Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Penarikan Jepang tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mengirimkan tentara dari masing-masing negara ke bagian selatan dan utara Semenanjung Korea. Namun pengerahan kekuatan tersebut dikaitkan dengan momen Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sehingga semuanya tidak terlepas dari penyebaran ideologi demokratik-liberal dan sosialis-komunis. Semenanjung Korea telah berjalan dalam realitas yang terbagi selama setengah abad dari tahun 1950 hingga sekarang. Sejak semenanjung Korea terbagi menjadi dua negara, tujuan utama Korea Selatan adalah penyatuan, karena Korea Selatan dan Korea Utara adalah satu negara dalam sejarah milenial. Oleh karena itu, kebijakan Korea Selatan dan Korea Utara sangat penting untuk mencapai tujuan nasional tersebut.

Kedua, penulis dalam penelitian mencatat bahwa antara tahun 1953 dan 2019, pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara menerapkan strategi yang berbeda untuk menyelesaikan dilema hubungan. Pertama, hubungan antar-Korea tetap penuh konflik antara tahun 1953 dan 1990. Kebijakan Korea Utara adalah kebijakan defensif dalam mempertahankan Korea Selatan yang masih labil dan akan bersatu kembali jika Korea Selatan runtuh. Korea Selatan pada awal masa pemerintahan lebih banyak dijalankan di bawah pemerintahan yang otoriter.

Pada periode tahun 1990-2010, pada masa ini terdapat perubahan politik Perang Dingin dimana Korea Selatan dan Korea Utara bergabung dalam *United Nations*. Pemerintahan Korea Utara bertindak dengan pasif karena adanya krisis makanan yang melanda mereka. Program nuklir juga digunakan sebagai jalan untuk beradaptasi dengan situasi geopolitik yang baru. Hubungan kedua Korea sempat membaik di bawah Presiden Kim Dae Jung. Dalam upaya reunifikasi Korea, ia mengeluarkan kebijakan Sinar Matahari (*Sunshine Policy*) hingga membawanya keberhasilan dengan mendapatkan Nobel Perdamaian. Namun, hubungan antar-Korea kembali memanas setelah pemimpin selanjutnya menerapkan kebijakan yang keras terhadap Korea Utara. Pemerintahan Korea Selatan pun cenderung dekat dengan Amerika Serikat untuk memperbaiki masalah yang timbul saat kepemimpinan sebelumnya.

Pada periode tahun 2010-2019, pertimbangan Korea Selatan terhadap berbagai faktor mungkin telah mempengaruhi arah kebijakan Korea Utara-Korea Selatan selama rezim Moon Jae In, yang lebih menyukai koeksistensi damai antar-Korea daripada penyatuan mereka. Mengingat faktor-faktor tersebut terkait dengan keputusan untuk mendukung reunifikasi kedua Korea atau sekadar mendukung hidup berdampingan secara damai di antara keduanya. Pada periode ini, Korea Selatan dan Korea Utara menjalin hubungan baik dengan berhasil mencapai titik baru dalam sejarah hubungan keduanya.

Ketiga, dengan krisis nuklir kedua pada tahun 2003 dan masalah antara Korea Utara dan Amerika Serikat, posisi Korea Selatan serba salah. Sejak tahun 2003, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme pertemuan enam pihak yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, Rusia, China dan Korea Selatan dan Korea Utara. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di

semenanjung Korea, KTT antar-Korea harus membuat proposal yang konkrit, termasuk solusi untuk masa depan reunifikasi Korea.

Namun pada kenyataannya, upaya penyelesaian konflik tersebut harus berdampak pada lingkungan eksternal, dalam artian solusi yang ada juga harus selaras dengan kepentingan kekuatan utama di Semenanjung Korea. Korea Selatan menawarkan cara pandang yang berbeda dengan menjadikan proses dialog persahabatan sebagai senjata utama dalam menghadapi Korea Utara. Kemajuan hubungan antar-Korea tidak terlepas dari beberapa isu mendesak. Beberapa kesulitan dalam proses ini berasal dari perbedaan politik dan ekonomi yang besar antar negara. Masalah jangka pendek mencakup sejumlah besar pengungsi yang berimigrasi dari Korea Utara dan ketidakstabilan politik dan ekonomi Korea Utara, tetapi masalah jangka panjang seperti perbedaan budaya, ideologi politik yang berlawanan, dan diskriminasi mungkin juga perlu ditangani.

Terakhir, kendala penyatuan Semenanjung Korea adalah sikap Korea Utara yang menerapkan standar ganda dalam program nuklirnya. Di satu sisi, Korea Utara menunjukkan sikap positif dalam setiap kesepakatan yang disepakati, di sisi lain tetap berpegang teguh pada program nuklirnya dan mengembangkannya lebih jauh. Menciptakan masyarakat Korea atas dasar kesamaan dan hidup damai berdampingan bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan banyak waktu.

Hambatan tersebut berawal dari perbedaan yang mendasar, yaitu persamaan ideologi kedua Korea yang menimbulkan kesan bahwa penyatuan Korea bukanlah hal yang mudah, karena masing-masing Korea menganggap ideologinya lebih unggul. Selain itu, program nuklir Korea Utara saat ini menjadi ancaman baru bagi kawasan Asia Timur. Selain itu, Korea Utara menghadapi ancaman kemanusiaan seperti kelaparan, kerusuhan dan kemungkinan emigrasi massal, serta ancaman militer konvensional. Hambatan utama untuk menghadapi berbagai tantangan ini berasal dari fakta bahwa tidak ada konsensus di antara negara-negara tetangga yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi langkah apa pun yang mungkin diambil Pyongyang.

Reunifikasi Korea tidak segera terjadi karena sejumlah alasan. Pertama, upaya kedua belah pihak tampaknya tidak ditujukan untuk mempersatukan Korea, melainkan hanya untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Kedua, konflik di

Semenanjung Korea bukan hanya konflik intra-Korea, tetapi bagian dari konflik global antara kubu komunis dan kubu dunia bebas, baik yang dipimpin oleh Uni Soviet maupun Amerika Serikat. Jadi reunifikasi Korea dimungkinkan jika permusuhan antara kekuatan besar yang terlibat dalam perselisihan global berubah.

Hambatan lainnya juga yaitu masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara sendiri memiliki respon dan pandangan yang kurang baik mengenai prospek reunifikasi kedua negara. Respon dan pandangan negatif dari masyarakat Korea tentunya berpengaruh terhadap dukungan pemerintah akan prospek reunifikasi Korea kedepannya. Oleh karena adanya rasa takut akan terjadi perang kembali, terutama masyarakat Korea Selatan, sebagian besar dari mereka berpendapat kurang setuju untuk melakukan reunifikasi. Sedangkan dari pihak Korea Utara, mereka memiliki perasaan takut jika penyatuan terjadi, mereka akan diserap sepenuhnya oleh pemerintah Korea Selatan.

Sejak awal periode sejarah, Korea memiliki tradisi Konfusianisme, di mana hal ini sangat mempengaruhi keluarga Korea mengenai pendidikan, filsafat, agama, sistem sosial dan politik, dan cara hidup sehari-hari. Secara umum, Konfusianisme sangat mempengaruhi masyarakat Korea dalam berbagai cara, seperti status, kontak sosial, serta hubungan dengan orang lain. Di sisi lain, orang Korea memang cenderung sangat ramah dan budaya mereka sangat menekankan pada ikatan kelompok. Dengan kata lain, orang Korea umumnya lebih berorientasi pada kelompok dan kolektif. Dari rasa memiliki ikatan yang dalam dengan kelompok itulah sehingga dapat menjadi salah satu alasan mengapa karakter orang Korea yang bisa dibilang “keras kepala” kemudian membuat kedua negara Korea sulit untuk bersatu kembali.

Reunifikasi semenanjung Korea telah lama menjadi masalah dan dianggap sulit dicapai karena gagalnya beberapa upaya penyatuan. Pada prinsipnya, penyatuan Korea tidak dapat dicapai dengan cara militer atau kekerasan. Ini terbukti tidak efektif, hanya merugikan kedua Korea dua kali lipat. Seiring dengan perkembangan politik internasional, hubungan Korea juga berkembang, meskipun tidak signifikan.

Korea Selatan memprakarsai upaya penyatuan melalui cara damai, dan Korea Utara menerimanya. Perjanjian tersebut juga mencakup konsep reunifikasi baru, yaitu penyatuan Korea menjadi dua negara yang saling mendukung dan hidup bersama secara damai, bukan penyatuan menjadi sistem payung negara-negara merdeka. Namun upaya reunifikasi tersebut dapat dikembangkan lebih luas lagi, mengingat isu

reunifikasi merupakan isu yang kompleks dan dapat berkembang dari berbagai sub-bahasan dan banyak perspektif lainnya.

1.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji oleh penulis mengenai “Dinamika Reunifikasi Korea Selatan-Korea Utara (1950-2019)”, bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Sejarah, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan bacaan tentang isu-isu di kawasan Asia Timur khususnya sengketa semenanjung Korea. Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan siswa SMA-SMK-MA, dalam KD 3.6 (Sejarah Peminatan, Kelas XII), yaitu menganalisis konflik di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Diharapkan melalui kajian ini, mahasiswa dan pelajar SMA dapat belajar tentang pentingnya membangun perdamaian dan persatuan bangsa, sehingga dapat mendukung dan menjaga persatuan bangsa, sehingga masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalami permasalahan reunifikasi Korea yang belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah reunifikasi tersebut, sehingga mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Sejarah tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Melalui penelitian skripsi ini pula dapat dilihat bahwa pasca berakhirnya presiden Kim Dae Jung di Korea Selatan, cita-cita Kim Dae Jung melalui Kebijakan Sinar Matahari memang masih dilanjutkan *oleh* penggantinya, hingga dengan pemerintahan Moon Jae In yang masih menggunakan kebijakan “*New Sunshine Policy*”, tetapi masih belum bisa menampakkan hasil yang baik mengenai reunifikasi. Memang lagi-lagi terlibat masalah Korea Utara meningkatkan jumlah kekuatan nuklirnya sehingga bisa mengancam Korea Selatan. Selain itu, bentuk pemerintahan Korea Utara yang masih menggunakan sistem *The Founding Father* menjadi faktor penghambat reunifikasi Korea. Fenomena penyatuan Korea ini menarik minat para peneliti, khususnya yang mempelajari sejarah kawasan Asia Timur, untuk mendapatkan fakta tentang perkembangan yang terjadi. Peneliti berharap ada yang tertarik untuk melanjutkan upaya penyatuan Korea, karena orang Korea belum menemukan cara yang baik untuk menjadi bangsa yang satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih banyak variabel lain yang belum dibenahi secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh waktu, tempat atau keterbatasan lain dari penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai topik ini atau ingin menggunakan objek yang sama untuk melakukan penelitian dengan beberapa variabel lain yang tidak dibahas untuk melengkapi hasil penelitian ini

